

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM SATU
DESA SATU PRODUK DI KABUPATEN GOWA
(IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES IN THE ONE
VILLAGE, ONE PRODUCT PROGRAM IN GOWA REGENCY)**

LATIFA NOUR AZIZAH

E062202002



**PROGRAM PASCA SARJANA S-2
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM SATU
DESA SATU PRODUK DI KABUPATEN GOWA**

**(IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES IN THE ONE
VILLAGE, ONE PRODUCT PROGRAM IN GOWA REGENCY)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

**LATIFA NOUR AZIZAH
E062202002**



**PROGRAM PASCA SARJANA S-2
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM
SATU DESA SATU PRODUK DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh

LATIFA NOUR AZIZAH

E062202002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin

pada tanggal **28 Juni 2024**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Juanda Nawawi, M. Si.
Nip. 19570818 198403 1 002

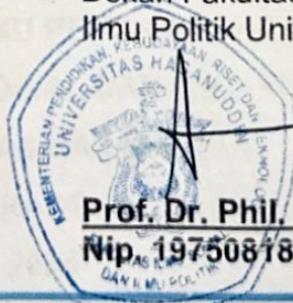
Pembimbing Pendamping,

Dr. A. M. Rusli, M. Si.
Nip. 19640727 199103 1 001

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan,
Hasanuddin,

Dr. A. M. Rusli, M. Si.
Nip. 19640727 199103 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas



Prof. Dr. Phil. Sukri, M. Si.
Nip. 19750818 200801 1 008

TESIS
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Latifa Nour Azizah
Nomor Pokok Mahasiswa : E062202002
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Gowa, 14 Juni 2024

Yang menyatakan



Latifa Nour Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Implementasi	9
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	10
2.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.4 Konsep Industri Kecil Menengah	26
2.5 Permasalahan Perkembangan IKM dan UMKM	27
2.6 Konsep One Village One Product (Satu Desa Satu Produk)	29
2.7 Implementasi One Village One Product di Berbagai Negara.....	40
2.8 Penelitian Terdahulu.....	45
2.9 Kerangka Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Lokasi Penelitian	49
3.2 Tipe Penelitian.....	49
3.3 Sumber Data	49
3.4 Teknik Penentuan Informan	50
3.5 Informan	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data	51

3.7 Fokus Penelitian	53
3.8 Analisa Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Sejarah Kabupaten Gowa	55
4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Gowa	63
4.1.3 Pemerintahan dari masa ke masa.....	67
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Gowa	72
4.1.5 Kecamatan Bontonompo.....	73
4.1.6 Kecamatan Tombolo Pao.....	74
4.1.7 Kecamatan Pallangga	75
4.2 Hasil Penelitian.....	77
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa.....	81
4.2.2 Aspek Komunikasi.....	82
4.2.3 Aspek Sumber Daya	89
4.2.4 Aspek Disposisi.....	97
4.2.5 Aspek Struktur Birokrasi.....	104
BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	45
Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten Gowa Berdasarkan Kecamatan.....	65
Tabel 3. Periode kepemimpinan Bupati gowa dari masa ke masa	71
Tabel 4. Sentra IKM Binaan Dinas Peindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward....	24
Gambar 2. Tiga Prinsip Gerakan OVOP	34
Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian.....	48
Gambar 4. Peta Kabupaten Gowa	63

ABSTRAK

LATIFA NOUR AZIZAH. **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa** (dibimbing oleh Juanda Nawawi, dan Andi Muhammad Rusli).

Program *One Village One Product* (OVOP/ Satu Desa Satu Produk) merupakan program inovatif yang bersifat strategis guna mengidentifikasi suatu produk lokal yang dapat dikembangkan untuk kemudian didampingi dalam perluasan pasar produk yang bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan daerah dengan berdasar pada nilai dan potensi daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa dengan menggunakan pendekatan Teori George C. Edward yakni aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang terdapat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tombolo Pao, Bontonompo, dan Pallangga yang menjadi lokasi penerapan Program Satu Desa Satu Produk. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Satu Desa Satu Produk melalui empat aspek yaitu : Aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang terdapat pada tiga lokasi kecamatan (sentra industri) yang diangkat dalam penelitian ini memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya pada setiap lokasi. Pertama, aspek komunikasi yang tidak dijalankan secara optimal yang berdampak signifikan di setiap lokasi, seperti ketidaktahuan akan pelaksanaan program serta informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas. Kedua, aspek sumber daya dalam pelaksanaan program tersebut tidak tercukupi/ terpenuhinya sumberdaya seperti dana, personel, dan infrastruktur yang menghambat pelaksanaan program tersebut dimana setiap kecamatan (sentra industri) tidak diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, aspek disposisi yang dimana implementor dan para pelaku industri kurang memahami program tersebut sehingga terjadi ketidaktahuan prosedur dalam pelaksanaannya. Keempat, aspek struktur birokrasi yang kurang jelas dikarenakan tidak adanya aturan khusus seperti peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sehingga terjadi ketidakjelasan prosedur dalam menjalankan program tersebut.

Kata kunci: Implementasi Program, Program One Village One Product, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

LATIFA NOUR AZIZAH. **Implementation of Government Policy in One Village One Product Program in Gowa Regency** (supervised by Juanda Nawawi, and Andi Muhammad Rusli).

The One Village One Product (OVOP) program is an innovative program that is strategic in identifying a local product that can be developed and then assisted in expanding the product market which aims to maximize regional development based on the value and potential of the region. This research aims to analyze the implementation of the One Village One Product Program in Gowa Regency using the George C. Edward Theory approach, namely the aspects of Communication, Resources, and Governance. Edward's Theory approach, namely aspects of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure found in three sub-districts, namely Tombolo Pao, Bontonompo, and Pallangga sub-districts which are the implementation locations of the One Village One Product Program. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques carried out by means of observation, interviews, literature studies, and documentation.

The results showed that the implementation of the One Village One Product Program through four aspects, namely: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure aspects found in the three sub-district locations (industrial centers) raised in this study have shortcomings in their implementation at each location. First, the communication aspect is not carried out optimally, which has a significant impact in each location, such as ignorance of program implementation and information that is not conveyed clearly. Second, the resource aspect in the implementation of the program is not sufficient/fulfillment of resources such as funds, personnel, and infrastructure that hinder the implementation of the program where each sub-district (industrial center) is not given assistance according to its needs. Third, the disposition aspect where implementors and industry players do not understand the program so that there is ignorance of procedures in its implementation. Fourth, the aspect of bureaucratic structure which is less clear due to the absence of special rules such as regional regulations issued by the local government, resulting in unclear procedures in running the program.

Keywords: Program Implementation, One Village One Product Program, Regional Regulation.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK DI KABUPATEN GOWA”. Tesis ini diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Salam dan salawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna dan layak untuk diteladani baik perkataan dan perbuatannya karena segala perkataannya mengandung nilai kebenaran dan segala perbuatannya mengandung nilai kebajikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidaklah mudah, banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi penulis, akan tetapi hambatan dan tantangan tersebut dapat penulis atasi berkat tekad yang kuat, usaha yang maksimal, dan dukungan materi, pikiran, tenaga, dan doa dari orang-orang sekitar.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa untuk ibunda **HJ.Nurdiana** Sipato, ayahanda **Prawoto** dan suami tercinta **Asnur Nasaruddin** serta anak kami **Alsava Adn Kyna Veeya** atas dukungan, dorongan, doa, serta kasih sayang yang tulus demi keberhasilan penulis semasa menempuh Pendidikan hingga akhir studi pada Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasih yang sebesar-besarnya pula penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si selaku pembimbing II yang selalu memberi bimbingan, arahan, saran, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadikan tesis ini lebih bermanfaat bagi masyarakat dan kepastakaan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan Jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Beserta Para Wakil Dekan Dan Jajarannya;

3. Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dan Dr. Andi Lukman Irwan, S.Ip, M.Si Selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan, saran serta perbaikan atas penulisan tesis ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Seluruh Dosen Pascasarjana, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, S.Ip, M.Si yang telah memberikan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di magister ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin;
6. Staf pegawai Program Pascasarjana, sluruh staf pegawai dan staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuannya kepada penulis;
7. Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Gowa;

8. Para informan dalam penulisan tesis ini yang telah menerima dan meluangkan waktunya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis;
9. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 magister ilmu pemerintahan FISIP Unhas;
10. Kepada saudara kandung penulis, Aziz Hadi Rahmanto, Mujibiarti Rosyida, Novi Hamiddiyani Nastiti serta nenek kami Hj. Djoharia Rala yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis M. Aksan, Zul, Yusra, Kaswandi, Ade, Yani, Afni, Mia, Ina, Fitri, Andika, Cheroel, Amel, dan Wiwin terima kasih atas kenangan yang terukir selama ini;
12. Sahabat-sahabat penulis MMG Fadli, Syabar, Adi, Uci terima kasih telah menjadi sahabat terbaik sejak SMA sampai sekarang;
13. Saudara-saudari seperjuangan *Lebensraum*, Semoga semangat merdeka militan tetap kita jaga. Kenangan bersama kalian akan tetap diingatan;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi bacaan bagi Pemerintah Daerah dalam

mengevaluasi kebijakannya serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Gowa, 14 Juni 2024

Latifa Nour Azizah/ E062202002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dapat menjadi cerminan kemandirian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang maju, berdaya saing, dan bermartabat. Sebaliknya dengan kemandirian daerah diharapkan terjadi peningkatan daya saing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip pemerintahan kerakyatan, keseimbangan, keadilan dan keunikan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemandirian daerah juga menjadi pintu gerbang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan daerah berdasarkan nilai dan potensi daerahnya masing-masing. Program Satu Desa Satu Produk merupakan program yang memiliki banyak dampak positif bagi pembangunan maupun pemberdayaan bagi wilayah yang mencanangkan program tersebut, terkhusus kepada masyarakat yang berkecimpung didalam lingkaran industri kecil menengah. Program Satu Desa Satu Produk melibatkan tiga prinsip panduan yakni:

1. Lokal namun global

Menciptakan produk yang dapat diterima secara global namun tetap mencerminkan kebanggaan terhadap budaya lokal.

2. Kemandirian dan kreativitas

Realisasi Program Satu Desa Satu Produk melalui aksi mandiri yang memanfaatkan potensi daerah

3. Pengembangan sumber daya manusia

Merupakan komponen terpenting dari gerakan ini agar masyarakat mampu menghasilkan produk-produk yang unik dan berkualitas, serta mendorong terciptanya sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang mampu menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang usaha di bidang pertanian, pemasaran, pariwisata dan bidang lainnya. melalui proses pembinaan orang-orang dengan semangat yang menantang dan kreatif.¹

Secara garis besar pelaksanaan Program Satu Desa Satu Produk dapat dilaksanakan dengan optimal apabila terdapat kolaborasi aktif antara pihak pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini pelaku industri. Namun pemerintah memegang peranan yang jauh lebih kompleks sebab pemerintah berperan sebagai pendamping sekaligus pengarah bagi para pelaku industri. Pendampingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah bukan hanya sebatas di awal program namun lebih jauh, pemerintah wajib mengawal jalannya program hingga tujuan program bisa tercapai. Adapun ruang lingkup kegiatan utama dalam Program Satu Desa Satu Produk adalah sebagai berikut:

¹ Morihiko hiramatsu dalam Fred R. Schumann, PhD, University of Guam School of Business and Public Administration. A study of *one village one product* (OVOP) and Workforce Development: Lessons for Engaging Rural Communities around the World. 2016. Hal.6

1. Inisiasi program, pemerintah sebagai inisiator program menentukan capaian yang ingin dicapai
2. Survey potensi komoditas lokal dan potensi pasar, dalam proses penentuan produk unggulan diperlukan sebuah proses Analisa pasar agar dapat ditentukan produk seperti apa yang ingin dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada
3. Sosialisasi program, sosialisasi diperlukan agar adanya kesepahaman visi dan misi antara pemerintah dan pihak pelaku industry agar tercapai sebuah keselarasan dalam pelaksanaan program
4. Implementasi program, dalam hal ini berupa pendampingan dan bantuan asistensi dari pihak pemerintah kepada para pelaku industri. Bentuk bantuan tersebut antara lain: pelatihan budidaya, pelatihan pasca produksi pemasaran dan fasilitas pasar.

Implementasi kebijakan/ program telah lama menjadi bahan perbincangan publik mengingat ada banyak fenomena yang terjadi didalam proses implementasi itu sendiri. Berbagai fenomena tersebut antara lain terkait mengapa suatu kebijakan yang telah melalui proses persiapan panjang kadang gagal mencapai tujuannya, mengapa program yang sama dimasing-masing daerah hasil pencapaiannya berbeda-beda, dan

mengapa jenis kebijakan disuatu daerah dapat berbeda tingkat keberhasilannya dibanding kabijakan yang lain.²

Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai macam variabel antara lain , siapa yang menjadi implementor dari suatu kebijakan, seperti apa tipe kebijakan yang dikeluarkan , dan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Maka dari itu untuk mendorong agar persentase keberhasilan suatu kebijakan publik semakin besar perlu dilakukan penguatan terhadap tiga variabel didalam proses perumusan kebijakan itu sendiri.

Sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, Kabupaten Gowa ikut serta dalam program “Satu Desa Satu Produk”. Rencana ini merupakan bentuk pemulihan perekonomian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Dasar hukum pelaksanaan rencana “Satu Desa, Satu Produk” adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peningkatan Daya Saing Pembangunan Usaha Kecil, Menengah dan Mikro. Badan Usaha No.78/M-IND/PER/9/No.2007. Melalui Program Satu Desa Satu Produk (OVOP) Pusat Regulasi, sejalan dengan visi Kabupaten Gowa untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, mandiri, kompetitif, dan berpemerintahan baik. Sejalan dengan itu, misi Kabupaten Gowa adalah mendorong pengembangan usaha kecil, kecil, dan menengah. Industri

² Erwan dan Dyah . *Implementasi kebijakan ppublik; konsep dan aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta.Gava Media .2015. Hlmn 24

Skala Menengah (UMKM), dengan fokus memanfaatkan sumber daya lokal dan mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Industri Gowa.

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam dua zona, yaitu 9 kecamatan dataran rendah dan 9 kecamatan dataran tinggi. Hal ini juga menimbulkan perbedaan sumber daya lokal yang tersedia di setiap kecamatan. Hal ini merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk membangun Industri Kecil Menengah Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengelompokkan IKM yang menghasilkan produk sejenis atau melakukan proses yang sama proses kerja sama. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan potensi daerah di suatu daerah untuk menciptakan produk unggulan berkelas dunia, khas daerah, dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan berdirinya sentra industri kecil menengah ini, menjadi penerapan usulan program Satu Desa Satu Produk di masing-masing kecamatan di Kabupaten Gowa

Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa telah di canangkan sejak pertengahan tahun 2017 dimana program ini dikoordinir langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penanggung jawab langsung di wilayah Kabupaten Gowa. Dimulainya Program ini ditandai dengan digelarnya kegiatan “Gelar Produk Dan Kerajinan” Khas Kabupaten Gowa yang dilaksanakan selama tiga hari dengan menghadirkan stand-stand dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa dan beberapa stand dari pihak swasta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai cara

untuk memperkenalkan produk-produk unggulan yang ada di setiap kecamatan dan dianggap berpotensi untuk dikembangkan baik dari proses produksi hingga pada proses pemasaran produk.

Program Satu Desa Satu Produk yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama ini belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gowa. Upaya pelaksanaan dan pengembangan program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa belum dibarengi dengan penerbitan kebijakan khusus terkait program tersebut. Minimnya kebijakan khusus yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Gowa mengakibatkan prosedur pelaksanaan program Satu Desa Satu Produk masih belum jelas. Tidak adanya sosialisasi mengenai Program Satu Desa Satu Produk menyebabkan ketiaktahuan akan adanya program tersebut sehingga tidak dapat berkolaborasi baik antar pemerintah dan pemerintah, pemerintah dan masyarakat industry, serta pemerintah dan pihak swasta. Oleh karena itu menarik dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa

Untuk mengkaji lebih dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam program satu desa satu produk. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang menyangkut judul : “ Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yakni Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa dilihat dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam program Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa dari perspektif aspek komunikasi, sumber informasi, tata letak dan struktur birokrasi.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat akademis, Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang peran penting pemerintah daerah dalam implementasi program kebijakan Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Gowa.
2. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkaji secara ilmiah gejala-gejala pemerintahan yang ada di dunia nyata berdasarkan teori-teori yang diperoleh. Hasil penelitian ini akan menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dan mengembangkannya di bidang lain.

3. Manfaat metodologis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan atau rekomendasi, yang selanjutnya akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau pemerintah daerah dalam mengembangkan program Satu Desa Satu Produk, baik bagi Pemerintah Daerah Gowa maupun daerah lain yang berminat untuk melaksanakan program tersebut di daerahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Implementasi

Konsep Implementasi Implementasi dapat dipahami sebagai suatu cara untuk mencapai sesuatu yang berdampak atau berakibat pada sesuatu. Sebagaimana dalam kamus Webster (Wahab, 2008: 64), konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implementation dalam Kamus Besar Webster, implementasi (implementation) berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan (provide the means to reach something); dan membawa akibat yang bersifat praktis (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Menurut Van Meter dan Horn (Winarno, 2002:102) implementasi dianggap sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh wakil pemerintah, kelompok non pemerintah, dan individu swasta dalam proses pencapaian tujuan yang tercantum dalam kebijakan

Dari sudut pandang Meter dan Horn dapat diketahui bahwa implementasi adalah segala bentuk tindakan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan yang sah berdasarkan kebijakan publik yang ada dan kemudian dengan tindakan para pemangku kepentingan tersebut akan memberikan dampak kepada masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya terkadang terdapat ketentuan-ketentuan dalam kebijakan yang menghambat proses implementasi itu sendiri

Konsep implementasi kebijakan memegang peranan penting karena tanpa adanya proses implementasi, tentu akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Selain itu peran implementasi kebijakan dapat dilihat dari fungsi implementasi yaitu menyalurkan hasil-hasil kebijakan, sehingga secara tidak langsung apabila tidak dapat dilaksanakan maka hasil-hasil kebijakan tersebut tidak akan terwujud.

2.2. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Hoogerwerf de Sjahrir (1988:66), konsep kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk tanggapan terhadap suatu masalah, suatu upaya untuk memecahkan, meringankan atau mencegah masalah tersebut dengan suatu cara, melalui tindakan langsung. James E. Anderson (1978:33) mengemukakan bahwa formulasi kebijakan merupakan tindakan sejumlah besar pemangku kepentingan (pejabat pemerintah, kelompok, organisasi) atau pemangku kepentingan yang berbeda dalam suatu bidang pekerjaan tertentu.

Menurut Dye, kebijakan publik dapat diartikan sebagai “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” Kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye bermaksud melihat pemerintah sebagai suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. tidak seharusnya dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari rumusan tujuan yang ingin dicapai, yang dapat dilihat

melalui visi dan misi pemerintah. Anderson dalam Widodo, menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kebijakan, secara spesifik sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau diarahkan pada tujuan tertentu
2. Kebijakan meliputi tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin dilakukan pemerintah
4. Kebijakan publik ada yang positif (tindakan pemerintah terhadap suatu masalah tertentu) dan negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5. Kebijakan publik (positif) selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoriter).

Suatu kebijakan publik pada dasarnya mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, umumnya tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Pembuatan kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, rumusan masalah merupakan salah satu tahapan dari proses pengembangan kebijakan, oleh karena itu pengembangan kebijakan merupakan isi pokok dari kebijakan. Dunn memaparkan beberapa karakteristik penting dari masalah kebijakan, antara lain:

1. Saling ketergantungan masalah kebijakan. Masalah kebijakan dalam satu bidang terkadang berimplikasi pada kebijakan di area lain. Dalam Dunn, Ackoff berpendapat bahwa masalah kebijakan sebenarnya bukanlah entitas yang otonom; masalah tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem masalah yang paling tepat digambarkan sebagai ketidakteraturan, yaitu, sistem kondisi eksternal yang menciptakan ketidakpuasan di antara berbagai segmen
2. Subjektivitas masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diidentifikasi, dikategorikan, ditafsirkan, dan dievaluasi secara selektif. Meskipun masalah dianggap objektif, data yang sama tentang suatu masalah dapat ditafsirkan secara berbeda
3. Sifat Buatan dari masalah. Masalah kebijakan hanya dapat muncul ketika orang membuat penilaian tentang apakah akan mengubah situasi yang bermasalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk dari penilaian manusia yang subjektif; kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan public. Banyaknya solusi untuk suatu masalah sama banyaknya dengan banyaknya definisi masalah tersebut. Masalah dan solusinya terus berkembang sehingga tidak selalu dapat diselesaikan Solusi dari suatu

masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri tidak dapat diselesaikan

Dalam proses perumusan kebijakan untuk menyelesaikan masalah sosial, kebijakan mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, hal ini sangat penting karena masyarakat akan secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial yang berlaku di masyarakat dan tidak boleh ada perlawanan atau resistensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

Ada banyak pandangan profesional yang berbeda tentang bagaimana kebijakan publik dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya adalah Thoha mengidentifikasi dua aspek dalam kebijakan publik, pertama, munculnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial, artinya proses politik tidak berada dalam ruang hampa melainkan berdiri sendiri sebagai produk dan kegiatan pemerintah, kebijakan sangat erat kaitannya dengan perubahan social. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta dalam Dinamika tersebut direduksi menjadi isu publik untuk memfasilitasi munculnya produk politik. Kedua, kompleksitas kebutuhan publik dan tantangan yang muncul telah mendorong kelompok DPRD, kelompok kepentingan sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengembangkan kebijakan guna mengatasi konflik kepentingan. Masing-masing kelompok kepentingan tersebut

membentuk dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan politik untuk memengaruhi pilihan kebijakan

Dengan berbagai definisi di atas, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai serangkaian kegiatan dan proses yang ditujukan untuk memecahkan masalah publik yang mengandung konsep dan nilai yang konsisten dengan yang berlaku di masyarakat. Kebijakan publik dikembangkan melalui tahapan-tahapan tertentu, dengan satu atau sekelompok aktor pada setiap tahap proses pembuatan kebijakan public. Tahapan-tahapan yang disebutkan dapat dipahami dalam pandangan Dunn tentang tahapan kebijakan, yaitu:

1. Tahap penyusunan agenda. Pejabat yang dipilih dan ditunjuk mengembangkan isu-isu strategis yang kemudian ditempatkan dalam agenda. Di masa lalu, isu-isu ini bersaing untuk dimasukkan dalam agenda politik. Terakhir, beberapa pertanyaan jatuh ke tangan para pembuat kebijakan
2. Tahap perumusan kebijakan. Isu-isu dalam agenda politik dibahas oleh para pengambil keputusan. Isu-isu terkini kemudian dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi terbaik atas masalah tersebut. Solusi atas masalah ini memiliki banyak bentuk yang berbeda, Pada tahap ini setiap opsi yang bersaing dipilih untuk menjadi kebijakan guna menyelesaikan masalah tersebut

3. Tahap Adopsi kebijakan. Dari berbagai bentuk alternatif kebijakan yang diajukan oleh para pengambil kebijakan, salah satunya akhirnya diadopsi, baik melalui konsensus di antara para pemimpin eksekutif, legislatif, maupun dengan dukungan putusan pengadilan
4. Tahap implementasi kebijakan Berdasarkan hasil keputusan kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian diimplementasikan oleh administrator berdasarkan sumber daya manusia dan kemampuan finansial
5. Tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah diimplementasikan dievaluasi untuk melihat seberapa baik kebijakan tersebut telah diimplementasikan

2.3. Teori implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu proses kompleks yang menghubungkan tujuan dan hasil kebijakan berdasarkan hasil tindakan pemerintah. Hal ini terjadi karena proses implementasi itu sendiri mengarah pada pengembangan jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui kegiatan lembaga pemerintah, yang di dalamnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada saat proses perumusan kebijakan. Namun, dalam merumuskan suatu kebijakan, pemerintah harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi jika merugikan masyarakat

Menurut Meter dan Horn dalam Suharsono, ada enam variabel yang dapat dijadikan ukuran kinerja, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan, standar dan tujuan kebijakan perlu diukur secara jelas sehingga dapat dipertimbangkan apabila standar dan tujuan kebijakan tidak jelas kebijakan, kemudian kemampuan pemahaman implementor dan sudut pandang penilaian implementor.
2. Sumber Daya: Sumber daya merupakan pendukung utama implementasi
3. Hubungan antar organisasi, artinya dalam banyak program, pelaksana program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan organisasi lain, dan keberhasilan program memerlukan koordinasi dan kerja sama antar organisasi
4. Karakteristik pelaksana yang didalamnya terdapat struktur birokrasi, pola, dan norma hubungan dalam birokrasi yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel-variabel tersebut bergantung pada sumber daya ekonomi dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana pemangku kepentingan mendukung implementasi kebijakan, karakteristik partisipan, yaitu sifat implementasi kebijakan dalam lingkungan yang mendukung atau tidak mendukung dan apakah pemimpin politik mendukung kebijakan tersebut
6. Disposisi Implementor mencakup tiga hal penting, yaitu reaksi pelaksana terhadap kebijakan, yang memengaruhi persepsi motivasi kebijakan, kemudian kemampuan manajer proyek dalam memahami dan perspektif evaluasi manajer proyek.

Model Implementasi kebijakan

Terdapat sejumlah model yang dikemukakan oleh para ahli mengenai implementasi kebijakan, masing-masing model memiliki karakteristik tersendiri dalam memvisualisasikan variabel atau faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Model Hoogwood & Gun

Menurut Brian W Hoogwood dan Lewis A Gun, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sejumlah persyaratan yang harus

diperhatikan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut adalah:

1. Meliputi jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar
2. Adanya jaminan sumber daya yang memadai
3. Sinkronisasi sumber daya yang ada
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan harus didasarkan pada hubungan sebab akibat yang dapat diandalkan
5. Dalam hukum sebab akibat, diyakini bahwa semakin sedikit hubungan sebab akibat, maka semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut mencapai hasil yang diinginkan
6. Interdependensi yang lemah. Misalkan jika interdependensinya tinggi maka implementasi akan sulit dicapai
7. Pemahaman yang mendalam dan implementasi yang terpadu
8. Tugas yang terperinci dan urutan yang tepat
9. Komunikasi dan kerja sama yang sempurna
10. Pemangku kepentingan yang kompeten dapat menuntut dan mencapai kepatuhan penuh

2. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam suharsono³ mengemukakan bahwa ada enam variabel yang dapat menjadi ukuran terhadap kinerja implementasi, yakni;

1. Standar dan sasaran kebijakan, seyogianya standar dan tujuan kebijakan perlu diukur dengan jelas sehingga dapat ditelisik dalam kasus ketika di mana standar dan tujuan kebijakan tidak jelas.
2. Sumber daya, sumber daya menjadi penyokong utama dari sebuah implementasi .
3. Hubungan antar organisasi, Artinya dalam banyak program, pelaksana program membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain, dan keberhasilan program memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga.
4. Karakteristik pelaksana di dalamnya terkandung struktur birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang kesemuanya mempengaruhi pelaksanaan program
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel-variabel ini tergantung pada sumber daya lingkungan dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok pemangku kepentingan mendukung implementasi kebijakan, karakteristik partisipan, yaitu sifat opini

³ Suharsono. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.(UNY Press. Yogyakarta.)Hlm. 21

publik di lingkungan yang mendukung atau menolak, dan apakah pimpinan politik mendukung implementasi kebijakan

6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu Respon pelaksana terhadap kebijakan, hal ini mempengaruhi persepsi motivasi untuk mengimplementasikan kebijakan, kemudian kemampuan pemahaman implementor dan sudut pandang penilaian implementor.

3. Model George C. Edward

Menurut George Edward III, ada empat faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain: Keempat faktor tersebut adalah:

1) Komunikasi

Komunikasi menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik dalam mencapai tujuannya. Implementasi yang efektif terjadi ketika para pengambil keputusan sudah tahu apa yang mereka lakukan. Komunikasi yang baik mengharuskan semua keputusan kebijakan dan aturan penegakannya disampaikan (atau dikomunikasikan) ke departemen SDM yang tepat untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Komunikasi diperlukan bagi para pengambil keputusan dan pelaksana untuk lebih koheren mengimplementasikan semua

kebijakan yang diterapkan di masyarakat. Terdapat Tiga indikator dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi: Proses konversi informasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pengambil keputusan perlu tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Penyebaran informasi yang baik juga akan mengarah pada implementasi yang baik
- b) Kejelasan: Komunikasi yang tidak jelas dapat mempengaruhi implementasi kebijakan karena mungkin berbeda dari makna aslinya atau menyebabkan kesalahpahaman
- c) Konsistensi: Perintah yang ditentukan dalam implementasi komunikasi harus konsisten agar dapat diimplementasikan dengan benar. Inkonsistensi dapat membingungkan pelaksana lapangan karena perintah yang ditentukan sering berubah

2) Sumber Daya

Komunikasi yang jelas dan Kebijakan yang koheren tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila para pelaksananya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, sehingga implementasinya menjadi tidak

efektif. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia seperti kapasitas para pelaksana dan sumber daya keuangan

- a) Staf: Staf merupakan sumber daya utama untuk implementasi kebijakan. Salah satu kegagalan implementasi yang paling umum adalah staf lapangan yang tidak memadai, tidak kompeten atau tidak kompeten. Sekadar menambah jumlah pelaksana kebijakan dan staf saja tidak cukup, tetapi juga memerlukan keterampilan dan kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan
- b) Informasi: Informasi merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi untuk implementasi kebijakan adalah setiap informasi dalam bentuk dokumen atau pesan, instruksi, pedoman dan prosedur implementasi untuk implementasi kebijakan
- c) Wewenang: Wewenang merupakan bentuk kekuasaan yang sah dari eksekutif dalam mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan secara politis. Di mana ada wewenang, di sana terdapat hak istimewa tidak langsung di mata publik untuk memiliki perlindungan formal terhadap segala sesuatu yang mungkin mengganggu proses implementasi kebijakan.
- d) Fasilitas : Penyediaan fasilitas fisik maupun pendukung merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dapat menyebabkan kebijakan gagal.

3) Disposisi

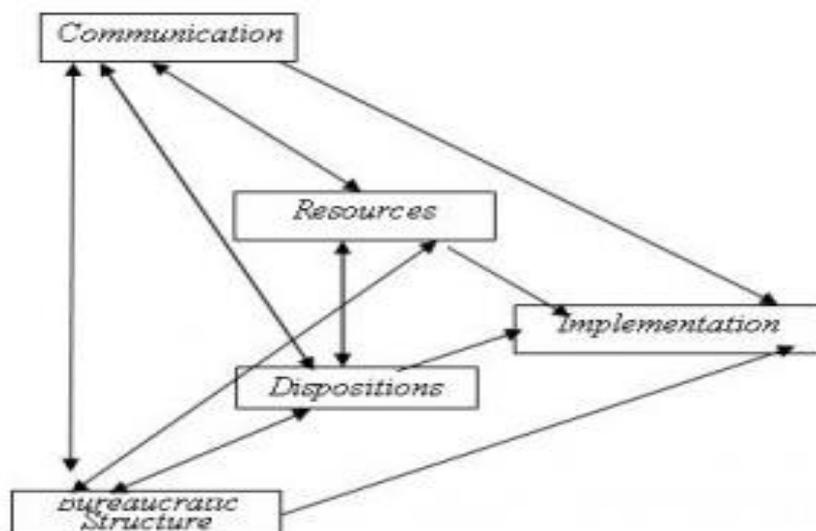
Sikap merupakan sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, meliputi komitmen, kejujuran, dan demokrasi. Apabila pelaksana mempunyai niat yang baik, maka ia dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Sikap ini dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, atau persetujuan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Ada tiga macam faktor yang mempengaruhi kecenderungan tersebut, yaitu pengetahuan (awareness), pemahaman dan wawasan (understanding and understanding) terhadap kebijakan, arah reaksi mereka, penerimaan, netralitas, atau penolakan terhadap politik.

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan, disini pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting karena dapat membantu dalam melaksanakan implementasi yang dilandasi oleh pengetahuan yang tinggi yang dimiliki oleh aparatur pelaksana. Kemudian, pemahaman dan wawasan dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi yang dilandasi oleh tujuan yang ingin dicapai. Reaksi masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan implementasi, karena dapat menentukan penerimaan, netralitas, atau penentangan masyarakat.

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks tentu membutuhkan kerja sama banyak orang, namun apabila birokrasi tidak disesuaikan dengan kebijakan yang ada, maka akan menimbulkan sumber daya yang tidak efektif, hilangnya motivasi, dan menghambat jalannya kebijakan. Menurut Edward, dua hal yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan pengorganisasian yang lebih baik yaitu : a) Standar operasional prosedur ; dengan adanya SOP maka kegiatan akan direncanakan secara teratur dan selanjutnya memungkinkan staf untuk melaksanakan kebijakan sesuai standar yang telah ditetapkan b) Fragmentasi ; dengan adanya fragmentasi struktur birokrasi maka pelaksanaan akan lebih efisien karena akan dilakukan oleh organisasi yang kompeten dan berwenang

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward



Dari Gambar 1 terlihat bahwa instruksi yang tidak tepat, tidak jelas dan tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan bagi para praktisi dalam melaksanakan kebijakan secara nyata. Sebaliknya, pertukaran informasi yang terlalu rinci dapat melemahkan moral dan mengurangi kebebasan pelaksana, sehingga menciptakan kondisi yang dapat mengakibatkan perubahan arah kebijakan pada saat pelaksanaan yang sebenarnya dan pemborosan dalam pelaksanaan. Pemborosan sumber daya seperti kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi karyawan.

Agen pelaksana tidak lain hanyalah sebuah “robot” yang hanya melaksanakan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan (prostaps) dari suatu kebijakan. Dengan demikian, dampak komunikasi terhadap implementasi juga diekspresikan melalui sumber daya, pengaturan, dan struktur birokrasi. Sumber daya juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap implementasi, termasuk melalui interaksi komunikasi dengan berbagai cara. Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan juga berarti arah kebijakan tidak dipatuhi. Jika sumber daya yang tersedia cukup banyak, hal ini akan menyebabkan individu dan organisasi yang berpartisipasi dalam implementasi kebijakan akan bersaing ketat untuk melindungi kepentingan pribadi dan organisasinya.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa faktor komunikasi, sumber daya, tata letak, dan struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Masing-masing faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil implementasi. Model implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III bersifat top-down dan memungkinkan kita melihat bagaimana implementasi berlangsung pada level birokrasi yang terstruktur di instansi pemerintah. Setiap level memiliki peran sesuai fungsinya dalam merumuskan kebijakan implementasi. Implementasi kebijakan pada setiap level birokrasi dimulai dari level atas (pemerintah pusat), pemerintah provinsi, pemerintah daerah/kota dan sampai pada implementasi di level lapangan

2.2. Konsep Industri Kecil Menengah (IKM)

IKM adalah unit usaha produksi mandiri yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha dari semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara industri kecil, menengah, dan besar biasanya didasarkan pada nilai investasi awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata pendapatan tahunan, dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Secara khusus, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbeda dengan industri kecil dan menengah (IKM) karena IKM merupakan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh berbagai organisme hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan UMKM lebih berfokus pada komersialisasi hasil produksi perusahaan dalam industri tersebut. Jika kegiatan yang dilakukan oleh

suatu perusahaan meliputi produksi dan pemasaran, maka perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai IKM dan UKM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Perusahaan Industri, pengertian masing-masing industri adalah sebagai berikut:

- a. Industri kecil adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan secara keseluruhan tidak melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha komersial
- b. Industri menengah adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha komersial.
- c. Industri besar adalah perusahaan dengan nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan mempunyai tenaga kerja paling sedikit 20 orang.

2.3. Permasalahan Perkembangan IKM dan UMKM Di Indonesia

Perkembangan Industri maupun usaha mikro di negara-negara berkembang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat. Hambatan ini mungkin berbeda antara daerah pedesaan dan

perkotaan menurut faktor wilayah atau antara pebisnis yang bergerak pada sektor yang sama. Permasalahan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan modal dan keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan dan kelembagaan. Inklusi keuangan harus diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan lembaga keuangan. Penyertaan modal harus disertai dengan saran tentang sistem manajemen
- b. Kualitas sumber daya manusia entitas ekonomi masih rendah. Kapasitas manajemen entitas ekonomi harus ditingkatkan. Demikian pula, sistem kerangka kerja harus ditetapkan. Biasanya hanya ada satu orang di setiap perusahaan, sehingga Anda memerlukan tim yang kuat yang mampu mewarisi bisnis dari pendiri
- c. Kemampuan pemasaran terbatas. Meskipun media daring telah berkembang, namun masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha
- d. Akses terhadap informasi komersial masih rendah
- e. Belum ada kerja sama yang memadai dan saling menguntungkan antara pelaku ekonomi, sektor swasta, dan perusahaan daerah
- f. Distribusi dan pasokan bahan baku dan input lainnya masih sulit diakses

- g. Biaya tinggi karena prosedur administratif dan birokrasi yang rumit, terutama dalam pengelolaan izin usaha, dan ketidakpastian karena kebijakan dan peraturan ekonomi yang tidak jelas dan tidak pasti

2.4. Konsep One Village One Product/ Program Satu Desa Satu Produk

Program One Village, One Product pada awalnya digagas oleh Morihiko Hiramatsu, mantan pejabat MITI yang terpilih sebagai Gubernur Oita pada tahun 1979. Masa jabatannya di Oita berlangsung selama enam periode (1979-2003). Program ini menerapkan konsep pembangunan daerah yang partisipatif dan bermanfaat dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengembangkan potensi daerahnya guna mengentaskan kemiskinan bagi warga masyarakat, sehingga mereka dapat mengandalkan diri sendiri untuk bangkit dalam bidang kesejahteraan, kebahagiaan, dan pembangunan daerahnya. Program One Village, One Product sendiri dipahami sebagai program berbasis pembangunan masyarakat, dengan pendekatan pembangunan ekonomi berbasis pasar dalam inisiatifnya. Program One Village, One Product bertujuan untuk membantu mengembangkan kapasitas masyarakat desa dalam produk-produk tertentu dan meningkatkan perekonomian pedesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat lokal. Dalam konsep One Village, One Product, masyarakat diasumsikan mampu

menghasilkan barang-barang pilihan yang bernilai tambah tinggi. Setiap desa kerajinan harus menghasilkan produk inti yang berdaya saing dan mampu bersaing dalam skala global, sekaligus memiliki ciri khas dan karakteristik daerahnya sendiri. Produk yang dihasilkan merupakan produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik alam maupun non alam. dan sumber daya manusia.

Pendekatan program Satu Desa Satu Produk merupakan upaya untuk mempersempit kesenjangan kegiatan pembangunan di kota dan desa dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, mengembangkan produk yang berdaya saing di pasar global dengan mengutamakan nilai tambah lokal, serta mendorong semangat penciptaan kemandirian masyarakat. Sejak awal, program Satu Desa Satu Produk diperkenalkan sebagai kebijakan yang menciptakan solusi atas masalah kelebihan penduduk dan mengatasi stagnasi industri lokal. Lebih jauh, konsep yang dikedepankan dalam program ini bukan hanya kesejahteraan ekonomi (Produk Grosir Nasional) tetapi juga kepuasan internal (Kepuasan Grosir Nasional) masyarakat setempat.

Pengertian program Satu Desa Satu Produk di Indonesia menurut Deputi Direktur Riset Sumber Daya UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah yang bermutu guna meningkatkan mutu hidup masyarakat dalam konteks koperasi atau UMKM. Program Satu Desa Satu Produk mengacu pada pendekatan GNS (Gross National

Satisfaction) yang lebih menekankan pada mutu atau “content over form”
Konten berarti potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui upaya yang nyata bagi penghidupan masyarakat Hal ini menjadi alasan utama lahirnya program Satu Desa Satu Produk Menghargai sepenuhnya karya kreatif mendatangkan kepuasan ekonomi dan spiritual Model penilaian yang sama ini merupakan pendekatan kultural dalam menggali dan mengembangkan nilai ekonomi suatu masyarakat (desa, kecamatan, dan sebagainya). Ciri khas metode ini adalah tercapainya pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia melalui pengolahan, pengendalian mutu, dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah produk Oleh karena itu, program Satu Desa Satu Produk merupakan Upaya strategis untuk mengidentifikasi produk lokal dan memperluas pasar

Program Satu Desa Satu Produk juga dapat dijabarkan sebagai konsep SAKA SAKTI (Satu Bupati/Kota Satu Kompetensi Inti), yaitu suatu konsep yang dikembangkan untuk meningkatkan daya saing suatu daerah dengan menciptakan kompetensi inti bagi daerah tersebut sehingga mampu bersaing secara global. Model SAKA SAKTI menekankan pada upaya menemukan dan mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki (atau seharusnya dimiliki) suatu daerah dengan mempertimbangkan kekayaan sumber dayanya. Pengertian sumber daya tidak terbatas pada sumber daya alam saja, tetapi juga mencakup sumber daya lainnya, termasuk

kreativitas dan inovasi manusia. Konsep ini penting agar sumber daya dan kapasitas lokal dapat diarahkan pada penciptaan keterampilan dasar.

Ada dua konsep pengembangan keterampilan dasar melalui pendekatan Satu Desa Satu Produk, pertama adalah konsep penciptaan produk unggulan, yaitu pengembangan produk lokal yang memiliki keunggulan unik, berbeda, memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna produk tersebut dan memberikan manfaat yang besar pula bagi produsen produk tersebut. Kedua, konsep membangun kompetensi inti daerah, dalam hal ini daerah harus memilih kompetensi inti daerah yang bersangkutan dilihat dari keunikan, kekhasan daerah, kekayaan sumberdaya alam, peluang untuk menembus pasar internasional dan dampaknya.

Dengan demikian, ide program One Village One Product lebih mengutamakan produk-produk unik yang terdapat di daerah tersebut bahkan produk-produk tersebut menjadi ikon atau simbol daerah tersebut. Keunikan ini menyangkut budaya, lingkungan, bahan baku, produksi, dan proses produksi. Sementara itu, produk-produk program One Village One Product merupakan produk-produk suatu daerah yang memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Karena keunikan dan proses produksinya yang langka, maka akan memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Selain itu, daerah yang menjadi lokasi penerapan program One Village One Product menjadi menarik dan dapat dijadikan sebagai destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara. Tentunya, hal ini menjadi

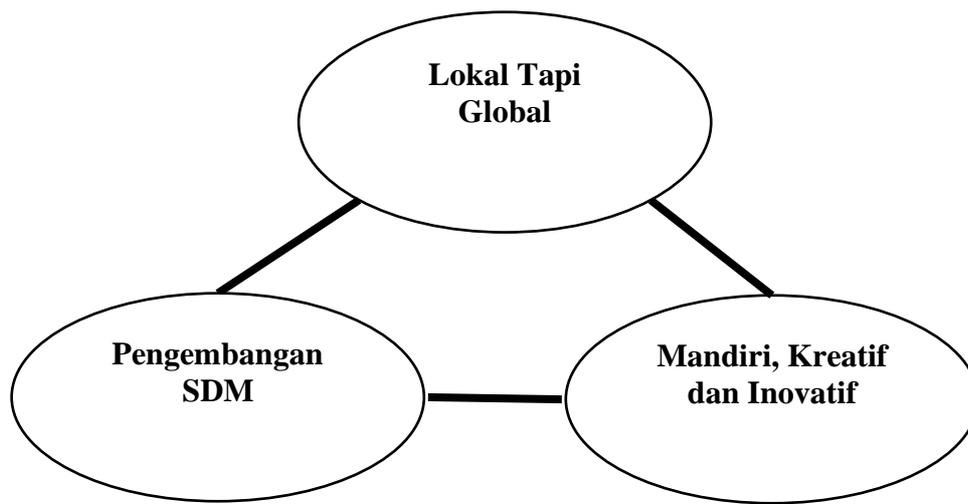
peluang usaha baru yang juga akan memberikan kontribusi bagi daerah tersebut. Pendekatan program “One Village, One Product” telah dipelajari dan diterapkan oleh banyak negara sejak tahun 2006, khususnya di Asia. Program “One Village, One Product” kerap diterapkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi antara desa dan kota di negara-negara Asia. Selain itu, OVOP juga telah dipelajari oleh negara-negara di Afrika, khususnya sebagai solusi bagi daerah-daerah miskin yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Berdasarkan data yang tersedia, program One Village One Product merupakan program unggulan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. data, ada beberapa negara di Indonesia yang sudah lebih dulu menerapkan program OVOP dibanding OVOP.

Negara-negara yang telah menerapkan OVOP di Asia sebelum Indonesia adalah Thailand (One Tambon, One Product), Taiwan (One City, One Product), Malaysia (One District, One Industry), Filipina (One City, One Product) dan Kamboja (One Village, One Product).

Penerapan OVOP di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2008 sebagai bagian dari program Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan potensi usaha kecil dan menengah di berbagai sektor, termasuk sektor kerajinan. Sepuluh daerah yang dipilih pemerintah untuk dikembangkan dengan pendekatan OVOP adalah: Purwakarta (keramik/gerabah hias), Tasikmalaya (tenun), Pekalongan (tenun dan anyaman akar wangi), Boyolali (kerajinan perunggu), Bantul

(keramik/gerabah hias), Kulonprogo (tenun), Bangli (anyaman bambu), Tabanan (keramik/gerabah hias), Lombok Barat (keramik/gerabah hias) dan Lombok Tengah (anyaman rotan).

Gambar 2. Tiga Prinsip Gerakan OVOP



Gerakan Satu Desa Satu Produk berlandaskan pada tiga prinsip yang harus dijunjung tinggi agar dapat menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Prinsip-prinsip tersebut adalah berpikir global, bertindak lokal, usaha mandiri dengan inisiatif, kreativitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Lebih khusus lagi, ketiga prinsip tersebut adalah:

1. Lokal tetapi global

Lokal tetapi global, yakni barang lokal dapat menjadi barang global. Umumnya masyarakat beranggapan bahwa barang lokal tidak memiliki ciri khas dan barang global memiliki ciri khas internasional. Kenyataannya tidak demikian, semakin autentik dan unik suatu daerah, maka produknya akan

semakin diapresiasi dan bernilai di tingkat global. Namun, produk lokal harus dipatenkan dan kualitasnya harus ditingkatkan. Melalui upaya ini, produk lokal dapat dikenal secara global dan dipasarkan secara global. Awalnya, masyarakat mengembangkan suatu produk yang baik, unik/khas dengan mutu unggul, kemasan yang cantik, manfaat yang menonjol dan tidak dapat digantikan oleh produk lain atau produk yang memiliki diferensiasi. Lambat laun, produk tersebut dapat memiliki konsumen yang banyak di dalam negeri, kemudian merambah ke pasar ekspor/luar negeri. Jadi, pengembangan gerakan OVOP bertujuan untuk menciptakan suatu produk khas daerah yang dapat dipasarkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di pasar global dan dapat Menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat setempat. Hal penting dalam pelaksanaan program OVOP adalah menetapkan kriteria pemanfaatan suatu produk dalam program OVOP. Sesungguhnya, program OVOP akan gagal jika terjadi kesalahan. Berikut ini definisi kriteria produk atau bahan baku OVOP bermutu tinggi menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2010):

- a. Merupakan produk unggulan desa/daerah atau merupakan keterampilan dasar dan dikembangkan secara turun-temurun
- b. Merupakan produk khas, unik dari desa kerajinan atau daerah setempat
- c. Mempunyai tampilan yang cantik dan kualitas produk yang baik
- d. Memberikan peluang perdagangan yang luas baik dalam negeri maupun internasional

- e. Menimbulkan nilai tambah yang tinggi pada produk, sehingga dapat menjadi penggerak perekonomian daerah atau lokal.

2. Mandiri, Kreatif dan Inovatif

Prinsip ini meramalkan adanya modal dan sumber daya pemerintah yang mungkin terbatas untuk menghitung risiko dan untung rugi, sehingga akan sulit dipertahankan. Kemandirian modal dan sumber daya akan mendorong masyarakat yang serius, karena inisiatif masyarakat akan membuat mereka merasa nyaman dan bersemangat. Pemerintah cukup mendukung infrastruktur jalan dan memfasilitasi pengelolaan rantai pasokan. Dalam jangka panjang, gerakan ini akan membentuk budaya yang khas.

Di sini, peran pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai sarana pengembangan produk dengan program-program kompetitif yang dipilih secara ketat. Program One Village, One Product (OVOP) bukan berarti hanya satu desa, satu produk, tetapi setiap desa terpilih, satu produk, difasilitasi oleh pemerintah. Prioritas diberikan kepada program-program yang mencerminkan kemandirian, kreativitas, dan inovasi masyarakat. Di sisi lain, program OVOP difasilitasi untuk menghindari dukungan apa pun yang dapat merugikan kemandirian, kreativitas, dan inovasi masyarakat, sehingga menghambat keberhasilan program OVOP dalam jangka Panjang. Penelitian APEC menyimpulkan bahwa subsidi pemerintah menciptakan ketergantungan pada masyarakat dan merusak kewirausahaan. Pemerintah harus fokus pada penciptaan lingkungan bisnis

yang menguntungkan, termasuk melalui regulasi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas dan promosi produk.

Dengan demikian, penggerak gerakan OVOP adalah masyarakat sendiri dan harus mengidentifikasi produk-produk lokal spesifik yang perlu dipilih dan dikembangkan sesuai pilihan masyarakat itu sendiri, gerakan OVOP merupakan kampanye untuk memfasilitasi pembangunan daerah melalui kesadaran akan realitas lokal, potensi pembangunan, semangat kemandirian/tolong-menolong akan bermuara pada kemandirian, harga diri, serta kreativitas dengan semangat kemandirian.

3. Pengembangan sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia harus selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, perubahan teknologi dan perubahan kebutuhan selalu bersifat dinamis. Dalam hal penentuan kebijakan publik, badan usaha yang mampu secara aktif berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia setempat, seperti melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang tepat sasaran, patut untuk didorong. Demikian pula perguruan tinggi secara sistematis melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia setempat.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan elemen terpenting dari gerakan ini. Sehingga masyarakat mampu menciptakan produk yang unik dan berkualitas dan mendorong terwujudnya sumber

daya manusia yang kreatif, inovatif, mampu menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang usaha di bidang pertanian, pemasaran, pariwisata dan bidang lainnya. Ada beberapa metode pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program OVOP, antara lain:

- a) Dukungan pemerintah dan dukungan bagi pelaku usaha di industri
- b) Pelatihan budidaya,
- c) Pelatihan pascaproduksi
- d) Dukungan pemasaran atau fasilitasi pasar.

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam Petunjuk Teknis OVOP, program pengembangan IKM dengan pendekatan berpusat pada OVOP meliputi: 1

1. Koordinasi dan sosialisasi program OVOP di provinsi
2. Identifikasi dan pemilihan sentra dan produk OVOP di provinsi/kabupaten/kota dan sertifikasi produk OVOP
3. Pembinaan dan pengembangan sentra OVOP dan produk OVOP, meliputi pelatihan, pendampingan profesi, pendampingan instalasi komersial, promosi dan pameran, pemasangan HAKI dan pemasangan modal
4. Alokasi OVOP
5. Klasifikasi dan pengembangan Produk OVOP.

Berdasarkan pedoman teknis pengembangan dan penumbuhan usaha kecil menengah pendekatan OVOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, meliputi kategori produk, persyaratan produk, persyaratan usaha kecil menengah, dan jumlah persyaratan produk yang harus dipenuhi. Kategori produk yang dapat dimasukkan dalam seleksi OVOP dapat berupa makanan, minuman, kain tenun, batik, kain tenun, dan keramik. Persyaratan umum yang harus dipenuhi produk adalah harus unik, dapat diekspor, dan proses produksinya harus berkelanjutan. Sedangkan untuk perajin atau pelaku UKM harus memiliki badan usaha berupa TDI (tanda daftar industri) atau IUI (izin operasi industri). Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2007, strategi pengembangan usaha kecil menengah pendekatan OVOP dapat dilaksanakan, meliputi:

1. Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat setempat
2. Pemanfaatan pengetahuan, tenaga kerja, dan sumber daya lokal lainnya yang khas daerah
3. Peningkatan kualitas dan tampilan produk
4. Peningkatan dan pemasaran secara nasional dan global

Satu desa, satu produk Cakupan produk:

1. Makanan olahan dari hasil pertanian dan hortikultura
2. Produk minuman dari hasil pertanian dan kehutanan olahan
3. Produk tekstil atau konveksi khas masyarakat setempat
4. Produk rumah tangga, termasuk produk dekorasi atau interior

5. Produk kerajinan tangan, termasuk produk souvenir
6. Produk herbal dan minyak atsiri khas masyarakat setempat

2.7. Implementasi One Village, One Product Di Berbagai Negara

Thailand (One Tambon, One Product/ OTOP)

Thailand, bersama dengan Malawi, adalah salah satu negara non-Jepang pertama yang mengadopsi pendekatan OVOP 2001. Pejabat Thailand menghadiri KTT Pertukaran Regional Asia Kyushu yang diselenggarakan oleh Gubernur Hiramatsu pada tahun 1994 dan mereka terkesan dengan apa yang telah dicapai OVOP (Kurokawa et al., 2010). OTOP (Satu Tambon Satu Produk) Thailand kemudian diterapkan, dengan tambon mengacu pada dasar unit administrasi di Thailand. Meskipun tambon bukanlah sebuah desa, tujuan OTOP serupa OVOP Jepang.

Satu perbedaan yang jelas antara OTOP dan OVOP Jepang adalah bahwa OTOP menggunakan top-down pendekatan dengan panduan dari pemerintah pusat versus pendekatan dari bawah ke atas di Jepang yang lebih mengandalkan jaringan komunitas lokal. Pemerintah di bawah Perdana Menteri Thaksin secara resmi meluncurkan Kebijakan Pembangunan OTOP pada tahun 2001 dengan pemerintah pusat berperan aktif berperan dalam menyediakan dana, penghargaan dan pelatihan, menetapkan standar kejuaraan produk OTOP untuk branding, dan dalam membangun situs web untuk grup OTOP. Program kejuaraan produk

OTOP, yang melibatkan sertifikasi produk dan branding produk berdasarkan sistem penilaian, diluncurkan pada tahun 2006 untuk memfasilitasi hubungan antara produk OTOP dan pariwisata (Fujikura dan Mukai, 2015). OTOP ini program kejuaraan produk dengan logo OTOP dan peringkat bintang satu hingga lima, serta berbasis web pemasaran melalui “Thai Tambon dot com” telah membantu meningkatkan pendapatan dari penjualan ke pelanggan di luar negeri.

Implementasi OTOP selama lima tahun pertama mendapat kritik luas, namun karena kegagalan proyek untuk meningkatkan kemampuan produsen dalam kemandirian dan kreativitas (Natsuda et al., 2011). Hal ini kemudian diatasi dengan diperkenalkannya kebijakan baru untuk dikembangkan sumber daya manusia. Proyek OTOP telah berkontribusi pada pengembangan ekonomi pedesaan Thailand, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Angka terbaru yang tersedia menunjukkan bahwa lebih dari 22.762 tambon nasional berpartisipasi dalam proyek dengan 37.840 produsen OTOP, dan lebih dari satu juta orang termasuk perempuan dan orang tua menikmati peningkatan pendapatan rumah tangga (OSSMEP, 2008).

Nepal (One District One Product /ODOP).

Nepal secara resmi memperkenalkan OVOP sebagai proyek percontohan lima tahun pada Juli 2006 setelah pejabat Nepal melakukan perjalanan ke Thailand untuk mempelajari keberhasilan program dengan

pendampingan JICA. Mereka mengambil perhatian bahwa populasi desa di Thailand jauh lebih besar dibandingkan dengan Nepal (sama dengan populasi perkotaan Nepal), tetapi tim melihat potensi dalam konsep dasar peningkatan kegiatan ekonomi melalui komersialisasi produk lokal dan digarap implementasi di Nepal. OVOP di Nepal adalah kemitraan swasta-publik yang melibatkan Federation of Nepali Chambers of Commerce and Industry's (FNCCI) Agro Enterprise Center dengan dukungan dari Kementerian Pembangunan Pertanian dan JICA (Ghimire, 2014).

Di bawah program OVOP, ribuan petani di Nepal telah mengubah hidup mereka dengan mengganti pertanian subsisten dengan pertanian komersial. Pada tahun 2012, ada 17 produk yang dikembangkan di 22 kabupaten hasil OVOP. Karena keberhasilan awal dan pengakuan masa depan yang lebih besar potensial, FNCCI memutuskan untuk memperluas program serupa di seluruh 75 distrik di negara tersebut. Sebagai permulaan, 48 jenis produk lokal unik diidentifikasi, terutama terdiri dari pertanian produk bersama dengan produk wisata religi dan desa. (FNCCI, 2012). Strategi ini merupakan perluasan OVOP yang masih eksis dan diberi nama One District One Product (ODOP).

ODOP berfokus secara khusus pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang, lapangan kerja lokal, peningkatan pendapatan, dan ketahanan pangan, dan bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk mempromosikan kewirausahaan. Federasi Kamar Dagang dan Industri

Nepal (FNCCI) sedang bermain sangat peran penting dari sektor swasta dalam kemitraan dengan Departemen Pertanian dan Koperasi. Rencana yang diterbitkan oleh FNCCI mengidentifikasi masing-masing dari 75 distrik di negara itu dengan spesifik tujuan, termasuk bidang-bidang seperti target pertumbuhan lapangan kerja dan mengembangkan manusia terampil sumber daya.

Republik Kirgistan (The Kyrgyz One Village One Product Association)

JICA memainkan peran penting dalam pelaksanaan OVOP di Republik Kirgiztan. Mereka memberikan dukungan keuangan untuk menyiapkan siklus produksi, menyelenggarakan pelatihan bagi manusia pengembangan sumber daya, dan melakukan pelatihan keterampilan pemasaran untuk studi pasar dan untuk produk penjualan. JICA juga menerbitkan sebuah manual untuk anggota, yang menjelaskan tujuan ekonomi serta fungsi pembangunan komunitas yang penting dari proyek. Setelah 3 tahun belajar untuk meneliti prospek pengembangan pariwisata kawasan Issyk Kul dan masyarakat yang berkelanjutan potensi pengembangan, proyek dimulai pada tahun 2006 dengan sasaran utama masyarakat pemberdayaan (Dadabaev, 2016).

Proyek ini menghadapi banyak tantangan di awal, seperti fluktuasi jumlah pekerja dalam kelompok kerja, volume produksi bervariasi karena produk musiman, dan kurangnya spesialisasi untuk memasarkan barang. Proyek mencapai titik balik di tahun 2010. Ryohin Keikaku Co., Ltd.,

perusahaan yang menjalankan lini toko MUJI, termasuk lebih dari 200 toko di luar Jepang, bertanya kepada JICA tentang sumber potensial untuk Produk hadiah Natal yang juga memiliki beberapa kaitan dengan pemberian amal. Akibatnya, kemitraan dibentuk antara MUJI dan JICA Kyrgyz untuk memproduksi barang-barang dari kain kempa, seperti casing ponsel dan pemegang kartu. (Membuat produk dari kain flanel adalah praktik tradisional bagi orang Kirgistan nomaden yang telah melakukannya secara turun-temurun untuk membuat yurt dan barang-barang lainnya.) Barang-barang kempa diproduksi oleh 25 kelompok yang tinggal dalam area hingga 700 km di sekitar Danau Issyk-Kul. Produser menerima pelatihan kerja langsung dari Ryohin Keikaku, seperti yang dikomunikasikan oleh perwakilan perusahaan pentingnya kualitas dan cara produk dijual di seluruh dunia, sementara mereka juga mendengarkan pendapat para produser. Kyrgyz merasa pemegang kartu dan benda-benda kecil lainnya terkena rak secara global di toko MUJI untuk musim Natal 2011 dan pesanan meningkat dari 10.000 unit pada tahun pertama menjadi lebih dari 20.000 unit pada tahun 2013 (MOFA, 2013).

Pada 2011, The Kyrgyz One Asosiasi Produk Satu Desa didirikan dan proyek baru dimulai pada tahun yang sama untuk membantu pengembangan produk dengan tujuan memperbesar proyek dengan tambahan anggota yang berpartisipasi. Beberapa produk selain kain flanel yang diproduksi oleh Kyrgyz OVOP antara lain karpet, buah kering, selai, madu putih, dan sabun herbal. Proyek ini memiliki dampak yang signifikan

tentang pemberdayaan perempuan, terutama mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharaan rumah tangga. Laporan terbaru menunjukkan bahwa proyek tersebut lebih menguntungkan individu yang berpartisipasi daripada yang diciptakannya peluang kerja baru untuk kelompok dan komunitas besar (Dadabaev, 2016), memberi pemimpin proyek tantangan untuk membangun kemitraan baru secara lokal untuk memperluas jangkauan OVOP.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

1	Judul	Implementasi program one village one product (ovop) pada koperasi paguyuban tenun troso kabupaten jepara
	Peneliti	Rosmalida Novia Adriani
	Metodologi penelitian	Metode penelitian kualitatif
	Hasil penelitian	Studi ini menemukan bahwa Hasil dari penelitian ini adalah keseluruhan proses implementasi program ovop berjalan dengan baik sesuai dengan Instruksi Gubernur nomor 518/23546. Meskipun tahap masukan memiliki penilaian yang buruk, Hal ini disebabkan tidak tersedianya unit usaha penyediaan bahan baku dan sumber daya manusia tidak memadai karena pendidikan. Sedangkan unit usaha simpan pinjam itu sudah tidak dapat sepenuhnya membantu anggota yang kekurangan modal.
	Persamaan penelitian	Penelitian ini memiliki kesamaan mengkaji tentang implementasi program One Village One Product/ Satu Desa Satu Produk di Kabupaten Jepara
	Perbedaan penelitian	Variable penelitian yang digunakan Lokasi penelitian yang berbeda

2	Judul	Efektivitas dan Efisiensi Implementasi OVOP dalam Pengembangan IKM Gerabah di Kasongan
	Peneliti	Aris Wahyudi
	Metodologi penelitian	Metode penelitian kualitatif
	Hasil penelitian	Dari analisis data ditemukan bahwa implementasi Program OVOP di Kasongan belum dilengkapi dengan buku petunjuk teknis OVOP dan sangat bergantung pada keberadaan seorang tokoh. Prinsip Local but Global, prinsip Self reliance and creativity, dan prinsip Human resource development yang seharusnya ada ternyata belum sepenuhnya dilakukan. Dengan kata lain, implementasi Program OVOP di Kasongan belum sesuai dengan prinsip dasar OVOP.
	Persamaan penelitian	Penelitian ini memiliki kesamaan menganalisis penerapan program One Village One Product
	Perbedaan penelitian	Variable dan lokasi penelitian yang digunakan
3	Judul	Analisis One village one product (OVOP) terhadap Penghasilan Tenaga Kerja Wanita di Kota Banda Aceh
	Peneliti	Fanny Nailufar
	Metodologi penelitian	Metode penelitian model analisis paired sampel test
	Hasil penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan melalui program OVOP memberikan dampak yang signifikan namun relatif sangat kecil terhadap penghasilan tenaga kerja wanita produk unggulan gampong yang menjadi UMKM binaan OVOP. Hal tersebut menunjukkan bahwa program OVOP di Kota Banda Aceh belum memberikan dampak yang memuaskan bagi UMKM binaan OVOP.
	Persamaan penelitian	Penelitian memiliki kesamaan menganalisis dan mengkaji tentang implementasi program One Village One Product/ Satu Desa Satu Produk
	Perbedaan penelitian	Variable dan lokasi penelitian yang digunakan berbeda

Sumber : Data sekunder setelah diolah

2.6. Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Satu Desa Satu Produk merupakan upaya bersama antara pelaku UKM dan UMKM, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan kemandirian UKM dan UMKM berdasarkan potensi daerah yang dimilikinya. Hal ini tidak hanya terbatas pada manfaat ekonomi saja, tetapi juga membantu mendorong pemerataan antara desa dan kota. Dengan demikian, program ini dapat memperkecil kesenjangan antara desa dan kota sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang sering terjadi, seperti urbanisasi, pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah

Program satu desa satu produk tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan bagi keluarga pengrajin, tetapi juga berpotensi untuk mempertahankan kearifan lokal melalui nilai-nilai adat yang diwariskan kepada generasi muda. Peran Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai inisiator program “satu desa satu produk” sangat krusial dalam menyukseskan program ini, karena tanpa campur tangan pemerintah program ini tentu tidak akan berjalan dengan baik. Gerakan Satu Desa Satu Produk (OVOP) tergolong sederhana dan mudah dipahami sehingga menarik bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat

Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III (1980) yang menyebutkan bahwa terdapat empat faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan atau program, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Penataan, dan Struktur Birokrasi. Teori ini sangat sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan karena teori dari George Edward III bersifat top down, dimana program One Village One Product dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, hal tersebut merupakan inovasi dan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pengambil kebijakan, namun program ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari seluruh unsur, mulai dari tingkat pemerintah daerah paling atas sampai tingkat bawah, para pelaku industri, pihak swasta dan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Gambar . 3
Kerangka Pikir Penelitian

